

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.10.25.80 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2026
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2026
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629)

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39)
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.10.25.80 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	87,5%
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	91,30
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87,00
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82,50
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,10
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN